

## **PERAN PEMERINTAH DAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA BARAT**

**Ayi Sobarna\***

### *Abstrak*

*Rendahnya Indeks pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2005, sedikitnya mengisyaratkan tiga hal: fenomena sosial, fenomena teknologi, dan fenomena konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah dan perguruan tinggi, sebagai lapisan masyarakat yang disebut Plato sebagai “manusia kepala” perlu mengambil peran untuk meningkatkan IPM ini melalui rekayasa sosial, rekayasa teknologi, dan penerapan UUD 1945.*

*Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui: 1. Peran yang dapat dimainkan pemerintah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat melalui rekayasa sosial, rekayasa teknologi, dan penerapan Pasal 33 UUD 1945.*

*Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif (qualitative and quantitative approach). Data-data yang dikumpulkan dalam tulisan ini berupa data skunder (secondary data) yang diperoleh melalui referensi yang relevan (relevant reference) dengan permasalahan dan kajian yang diangkat.*

*Dengan data tersebut, penulis berkesimpulan sebagai berikut: 1. Peran yang dapat dimainkan pemerintah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat melalui rekayasa sosial adalah dengan menyelenggarakan kurikulum berbasis kreativitas. 2. Peran yang dapat dimainkan pemerintah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat melalui rekayasa teknologi adalah melepaskan ketergantungan terhadap Bahan bakar Minyak. Bahan bakar Minyak yang berasal Sumber Daya Alam yang tak dapat diperbaharui perlu dicari penggantinya semaksimal mungkin dengan bahan dari Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui. Hal ini dapat dilakukan dengan menggalakan pembudidayaan tanaman*

---

\* **Ayi Sobarna, S.Ag.**, adalah Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah Unisba

jarak. Penanaman ini pun berfungsi sebagai penghijauan dan jaminan ketersediaan air bersih. 3. Peran yang dapat dimainkan pemerintah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 adalah dengan melakukan proteksi terhadap pengusaha kecil. Lebih baik memproteksi usaha rakyat kecil daripada memberi memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau BOS (Biaya Operasional Sekolah)

*Kata Kunci: Rekayasa Sosial, Rekayasa Teknologi,*

## **1 Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Rhenald Kasali pernah melakukan survey sederhana di ruang kuliah yang diasuhnya tentang komposisi pengeluaran mahasiswa. Ternyata, rata-rata mahasiswa menghabiskan sekitar 45-50 persen dari uang sakunya untuk *hand phone*: pulsa dan pirantinya (HU. Kompas, 23 September 2006). Ia kemudian memperlebar subjek surveynya kepada kalangan pembantu rumah tangga dan kaum muda di perkampungan. Hasilnya sama saja.

Di kalangan yang lebih mapan, dengan mengutip studi yang dilakukan *Euromonitor International*, Kasali mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 25 tahun (1990-2015), rumah tangga di Indonesia mengalami revolusi konsumsi yang luar biasa. Belanja konsumen untuk *air conditioner* naik 332 % cable TV naik 600 %, kamera naik 471%, sepeda motor naik 291% dan telepon naik 1.643%.

Selanjutnya, Kasali memberi komentar bahwa data di atas paradoks bagi prekonomian Indonesia. Di satu sisi konsumsi rumah tangga menyumbang 70% pertumbuhan ekonomi Indonesia, di sisi lain dianggap dapat merusak masa depan bangsa.

Menurut Bappenas (2005), dalam tahun 2000-2002, misalnya, perekonomian hanya tumbuh sekitar 4,0% per tahun, jauh di bawah suasana sebelum krisis yang tumbuh rata-rata sekitar 7% per tahun. Menurunnya pertumbuhan ekonomi ini mengakibatkan rendahnya penciptaan lapangan kerja. Dalam tahun 2002, pengangguran terbuka meningkat menjadi 9,1 juta jiwa (9,1 % dari total angkatan kerja) yang pada gilirannya tidak akan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Dalam tahun 2002 jumlah penduduk miskin mencapai 38,4 juta jiwa (18,2). Pada saat yang sama, di

perkotaan pekerjaan formal berkurang 0,47 % dan di pedesaan berkurang 1,1%. Di Jawa Barat angkatan kerja berjumlah 17,7 juta jiwa, sedangkan lapangan kerja yang tersedia hanya 8,24 persen. Ini berarti terdapat 2,26 juta penganggur. Sementara itu, 5,34 persen dari 32,29 juta (7.773.623 orang) penduduk propinsi ini tidak mampu baca-tulis. (Suseda, 2005).

Pada tahun 2005, perekonomian diguncang lagi oleh naiknya harga Bahan Bakar Minyak yang mencapai US\$ 64,67 per barel. Biaya transportasi, produksi dan seluruh barang naik. Perusahaan banyak yang melakukan PHK dengan karyawan. Gizi buruk dimana-mana. Sejumlah wilayah kesulitan air bersih. Maka Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada pada tingkat 112 dari 117 negara yang disurvei. Sementara itu, praktek-praktek ekonomi kapitalistik merambah hingga menghancurkan usaha-usaha rakyat kecil.

Sampai di sini, rendahnya IPM Indonesia mengisyaratkan adanya tiga hal: fenomena sosial, fenomena teknologi, dan fenomena konstitusi. Kemudian siapa yang harus bertanggung jawab?

Dalam setiap struktur negara terdapat lapisan puncak yang diisi oleh sebuah komunitas. Plato (427-347 SM) menyebutnya manusia kepala (Mudhofir, 2000). Vilfredo Pareto (1848-1923) menamainya elit (Malik, 1993). Ali Syari'ati menjulikinya *ulul albab* (Rakhmat, 1999). Apapun sebutannya, lapisan tersebut diisi oleh segelintir orang yang secara sosial dipandang superior dalam beberapa hal dan mempengaruhi atau mengontrol beberapa atau semua sektor dalam masyarakat. Plato mengeksplisitkan konsep manusia kepala dengan filsuf. Vilfredo Pareto mmeberi contoh elit dengan elit politik atau elit yang memerintah. Ali Syari'ati menjelaskan bahwa salah satu karakter kelompok ini adalah dibesarkan dalam tradisi sains. Namun, meskipun begitu, mereka tidak memuja sains. Sekali-sekali mereka mengajak orang pada kepekaan agamawi bahkan sekali-sekali mereka mengkritik sains. Kata pemerintah dan perguruan tinggi, sebenarnya merangkum istilah-istilah yang dimaksud Plato, Pareto dan Syari'ati di atas.

Dengan latar belakang tersebut, tampak bahwa pemerintah dan perguruan tinggi perlu mengambil peran untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Itu sebabnya, penulis memilih judul tulisan ini "Peran Pemerintah Dan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Barat".

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah dalam karya tulis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran yang dapat dimainkan pemerintah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat melalui rekayasa sosial?
2. Bagaimana peran yang dapat dimainkan pemerintah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat melalui rekayasa teknologi?
3. Bagaimana peran yang dapat dimainkan pemerintah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat berkaitan dengan Pasal 33 UUD 1945?
4. Bagaimana proyeksi Jawa Barat 25 tahun mendatang bila peran-peran pemerintah dan perguruan tinggi tersebut efektif?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui:

1. Peran yang dapat dimainkan pemerintah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat melalui rekayasa sosial;
2. Peran yang dapat dimainkan pemerintah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat melalui rekayasa teknologi;
3. Peran yang dapat dimainkan pemerintah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945; dan
4. Proyeksi Jawa Barat 25 tahun mendatang bila peran-peran tersebut efektif.

## 1.4 Manfaat

Adapun manfaat karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai masukan bagi pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengambil langkah-langkah proaktif menyikapi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia khususnya di Jawa barat.
2. Sebagai masukan bagi masyarakat dalam menyikapi rendahnya Indeks pembangunan Manusia di Jawa Barat
3. Sebagai masukan bagi para orangtua dalam melakukan interaksi edukatif dengan putera-putera mereka

## 1.5. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah deskriptif analitis, sedangkan pendekatannya bersifat kualitatif dan kuantitatif (*qualitative and quantitative approach*) serta proyektif. Data-data yang dikumpulkan dalam tulisan ini berupa data scunder (*scondary data*) yang diperoleh melalui referensi yang relevan (*relevant reference*) dengan permasalahan dan kajian yang diangkat.

## 2 Tinjauan Pustaka

### 2.1. Indeks Pembangunan Manusia sebagai Kritik atas *Gross National Product*

Menurut Francis Wahono (2005), Indeks Pembangunan Manusia pertama kali digagas oleh Ketua Bappenas Pakistan, Mahbubul Haq pada tahun 1970. Konsep ini semula merupakan kritik terhadap kebanyakan ekonom dan politikus yang mengukur keberhasilan kinerja suatu negara menurut indikator rata-rata GNP (Gross National Bruto) dan makro ekonomi (tingkat inflasi, pengangguran, investasi, tingkat pembelanjaan pemerintah, tingkat konsumsi dan posisi neraca perdagangan). Dengan kata lain, indikatornya sangat kuantitatif.

Sementara itu, Haq melihat banyak indikator kesejahteraan yang kebanyakan bersifat kualitatif. Meski demikian, ia mencoba melakukan kuantifikasi dan melaporkannya sebagai indeks kesejahteraan (pembangunan manusia) kepada UNDP dan negara-negara anggota PBB.

Dari tahun ke tahun, indeks telah dikembangkan, dari indeks mengenai tingkat kekurangan gizi, kematian bayi, usia harapan hidup, melek huruf, akses air bersih, fasilitas kesehatan sampai ke tingkat kesmiskinan dan pemberdayaan gender. Menurut Wahono (2005), dengan merujuk pada buku Peter Berger, *Piramida Korban Pembangunan*, perlu juga ditambahkan sebagai indikator IPM yaitu indeks ongkos manusia, lingkungan, politik dan budaya.

Wahono menjelaskan lebih jauh bahwa sebelum tahun 2000, IPM dirinci dengan perspektif tingkat pengurangan angka kemiskinan atau tingkat keberhasilan pembangunan. Namun, setelah tahun 2000 atau sekurang-kurangnya pada tahun 2001 dan 2004, IPM dilihat dari perspektif demokrasi.

## **2.2. Teori-teori Rekayasa Sosial yang Relevan dengan Upaya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia**

### **2.2.1. Teori Kepribadian Kreatif**

Teori kepribadian kreatif dikemukakan oleh Everette Hagen, seorang ekonom yang mencoba menggabungkan prinsip-prinsip psikologi ke dalam teori pembangunan ekonomi. Ia mengatakan bahwa perkembangan ekonomi yang dapat didefinisikan sebagai peningkatan per kapita secara terus menerus muncul dari kemajuan teknologi, harus dipahami dari sudut kepribadian kreatif. Argumennya, pertumbuhan ekonomi itu bertahap, melalui proses yang panjang. Perkembangan ekonomi tidak hanya membutuhkan teknologi ekonomi tetapi juga teknologi sosial. Teknologi sosial berkaitan dengan individu kreatif (Alimandan, 1993).

Selanjutnya, kepribadian kreatif ia petakan sebagai berikut:

1. Individu kreatif tidak tersebar secara merata di seluruh masyarakat. Karena itu, tugas para teoritis untuk memastikan bagaimana kreativitas itu berkembang dan menjelaskan mengapa kreativitas berkembang di kalangan kelompok-kelompok tertentu dan tidak berkembang di kalangan kelompok lain.
2. Individu kreatif memiliki kualitas inovatif. Ciri-cirinya: sangat besar kebutuhannya terhadap otonomi dan keteraturan; memberikan bobot yang sama antara berbuat untuk kesejahteraan orang lain dan berbuat untuk kesejahteraan diri sendiri; serta membayangkan dunia sebagai

tempat yang teratur, yang dapat dianalisis untuk memberikan tanggapan dan prakarsanya.

Pembentukan individu kreatif dimulai dengan peran orangtua. Orangtua yang keras mungkin mengharapkan anaknya berprestasi tinggi. Orangtua yang lemah mungkin mengharapkan anaknya mempelajari perilaku menurut cara-cara tradisional.

### **2.2.2. Teori Need for Achievement David Mc. Clelland**

Mc Clelland (Alimandan, 1993) mendasarkan teorinya pada tesis bahwa masyarakat yang tinggi tingkat kebutuhan berprestasinya umumnya akan menghasilkan wiraswastawan yang lebih bersemangat dan selanjutnya menghasilkan perkembangan ekonomi yang lebih cepat. Kebutuhan untuk berprestasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Sama dengan motif-motif lain pada umumnya, kebutuhan untuk berprestasi ini merupakan hasil dari pengalaman sosial sejak masa kanak-kanak. Tiga hal yang dianggap Mc. Clelland sangat mempengaruhi kebutuhan manusia berprestasi: berbagai faktor sosial, cara-cara memelihara anak, dan bacaan anak-anak.

Dengan memanfaatkan ajaran Sigmund Freud bahwa perilaku manusia tidak selalu rasional, Mc. Clelland berusaha menemukan motif di dalam diri seseorang dengan teknik proyektif. Ia menggunakan angan-angan orang untuk melihat motif-motifnya.

Ada tiga tipe riset yang ia kembangkan dengan kawan-kawannya. Tipe pertama, mereka mencoba menemukan tindakan-tindakan kelompok untuk menemukan ukuran kebutuhan untuk berprestasi dari kelompok yang bersangkutan. Ukuran kebutuhan kelompok didasarkan pada gagasan bahwa fantasi suatu kelompok dapat dilihat pada kepustakaan atau ceritera-ceritera yang ditulis orang kebanyakan. Mc. Clelland memberi skor pada ceritera-ceritera rakyat (folklore), buku-buku ceritera yang digunakan di sekolah dasar, dan bacaan imajinatif tentang masa lalu.

Tipe riset kedua dipusatkan pada kebutuhan untuk berprestasi dan pada pengaruhnya di kalangan remaja. Ia melakukan studi antarbangsa. Di Jepang, Jerman Barat, Brazilia dan India, anak-anak dites dengan dua teknik proyektif: menulis ceritera dan menggambar secara spontan. Mereka juga ditanya seputar nilai-nilai yang mereka anut. Sementara itu, ibu-ibu mereka diwawancarai mengenai latihan kejuruan dan latihan bebas.

Sedangkan tipe riset ketiga adalah untuk memastikan apakah tingkat kebutuhan untuk berprestasi mereka lebih tinggi dan aktivitas kewirausahaan mereka lebih luas dibandingkan dengan orang-orang yang seumur. Setelah membandingkan laju pertumbuhan ekonomi berbagai bangsa dengan tingkat kebutuhan untuk berprestasi dan membuat perbandingan historis antara laju pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan untuk berprestasi yang dikaitkan dengan ceritera-ceritera dan bacaan anak-anak, Mc. Clelland menyimpulkan bahwa hubungan itu sangat nyata.

### 3 Pembahasan

#### 3.1 Peran Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat melalui Rekeyasa Sosial

Melalui rekeyasa sosial, upaya meningkatkan Indeks pembangunan manusia di Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya perlu ditempuh pemerintah mengembangkan industri kreatif. Menurut Andi S. Boediman, seperti dikutip Dharmasaputra (Majalah *Tempo*, 16 Juli 2006), industri kreatif sejatinya merupakan tahap keempat dalam proses perkembangan ekonomi suatu negara, setelah melewati periode ekonomi berbasis pertanian, industri dan informasi.

Industri kreatif merupakan industri berbasis kreativitas, keahlian, dan bakat individual, yang berpotensi mendatangkan kemakmuran dan penciptaan lapangan kerja. Dari hasil pemetaan di Inggris, yang dimulai pada tahun 1998, diketahui bahwa industri ini terbilang paling cepat pertumbuhannya. Di Inggris, pada tahun 2002, sektor berbasis aset kekayaan intelektual (intellectual property) ini menyumbang 7,9 persen dari produk domestik bruto (GDP). Dalam rentang tahun 1997-2000, sektor ini tumbuh rata-rata 9 persen per tahun, jauh di atas pertumbuhan ekonomi negeri tersebut yang hanya 2,8 persen. Sebanyak 1,9 juta tenaga kerja terserap setiap tahun. Di Inggris ada tiga belas sektor yang masuk kategori industri ini. Di antaranya *advertising*, arsitektur, desain, film, musik, seni pertunjukan, televisi dan radio, serta jasa komputer dan peranti lunak. (*Ibid*, 2006).

Dalam perkembangannya, industri kreatif tumbuh sangat mencengangkan. Nilai pasar IBM, Intel, dan Micrisoft besarnya 2,3 kali lebih besar daripada industri otomotif. Raksasa film Walt Disney, nilai perusahaannya membengkak dari US\$ 2 miliar menjadi US\$ 22 miliar hanya



dalam sepuluh tahun. Lebih dahsyat lagi jika dilihat potensi ekonomi yang dihasilkan industri games dunia. Nilai pasarnya pada 2004 saja sudah mencapai US\$ 20 miliar (sekitar 186 triliun). Dan yang lebih fantastis, pencapaian ini hanya membutuhkan waktu 20 tahun – lebih cepat tiga kali daripada industri film Hollywood (*ibid*).

Sejumlah negara Asia yang giat mengembangkan industri informasi teknologi dan digital, seperti India, Jepang, Korea, Hong Kong dan Taiwan, juga akan mendapat keuntungan besar. Di India, industri animasi tahun 2005 mencapai US\$1,5 miliar (sekitar Rp. 14 triliun), dan akan diprediksi tumbuh 30 persen per tahun. Untuk melengkapi data, berikut ini disajikan andil industri hak cipta di beberapa negara:

#### Andil industri Hak Cipta

NO.	NEGARA	TAHUN	PDB (%)	LAPANGAN KERJA
1.	AS	2001	7,75	5,9
2.	Inggris	1997-1998	5,0	4,6
3.	Australia	1999-2000	3,3	3,8
4.	Singapura	2000	2,8	3,4

(Dharmasaputra dalam Majalah *Tempo*, 16 Juli 2006)

Bagaimana dengan Indonesia?

Menurut Kafi Kurnia, industri kreatif belum cukup mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia menabhkan bahwa birikrat hanya terpaku pada basis sumber daya ekonomi. Padahal potensi kreatif yang banyak dimiliki Indonesia dapat mendatangkan nilai tambah bagi perekonomian. (*Ibid*).

Meskipun memberikan perhatian serius terhadap kreativitas, hasilnya tak dapat terlihat secara cepat. Sebagai sebuah proses yang memerlukan waktu panjang, kreativitas melalui tahap-tahap yang unik: preapARATION (persiapan), incubation (inkubasi), illumination (illumination), dan verivication (verifikasi). Kreativitas pun bertingkat. Tingkat pertama adalah tingkat kreatif, yang ditandai dengan munculnya pemikiran yang divergen dan baru secara intuitif. Tingkat kedua disebut psikodelik atau perluasan pikiran dan

perasaan. Tingkat ketiga disebut tingkat imajinatif. Pada tingkat ini sudah ada suatu perkembangan produk atau hasil (Semiawan dkk., 1999).

Melihat keunikan tahapan dan tingkatan kreativitas, tampaknya diperlukan waktu satu generasi (sekitar 25 tahun) untuk melahirkan generasi kreatif secara massal. Pemerintah dan perguruan tinggi perlu bekerja sama membangun kreativitas bangsa secepat mungkin. Dalam operasinya, orangtua perlu dilibatkan karena kreativitas tumbuh sejak dini dan (mungkin saja) menghilang pada masa-masa tertentu. Masyarakat terutama kalangan sastrawan perlu juga dilibatkan karena seperti hasil penelitian Hagen dan Mc. Clelland yang penulis kutip pada Bab 2, kreativitas dipengaruhi secara nyata oleh ceritera-ceritera yang berkembang di kalangan masyarakat.

### **3.2 Peran Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat melalui Rekayasa Teknologi**

Melalui rekayasa teknologi, Pemerintah perlu mencari bahan bakar alternatif untuk menggerakkan mesin-mesin industri. Ini disebabkan karena di samping mahal harganya dan tidak ramah lingkungan. Bahan Bakar Minyak tak dapat diandalkan selamanya karena sifatnya sebagai Sumber Daya Alam yang tak dapat diperbaharui.

Di lain pihak, harga minyak berkaitan dengan situasi politik global padahal ia terkait dengan seluruh proses produksi, jalur transportasi, dan distribusi. Kenaikan harga BBM dengan sendirinya meningkatkan berbagai biaya modal (*cost of capital*) sehingga memicu kenaikan berbagai harga barang (Muhardi, 2005). Kondisi ini akan mengancam operasi perusahaan atau investor beralih ke negeri lain. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tak terelakkan. Nilai mata uang terdepresiasi. Kemampuan daya beli menurun. Bayi-bayi mengalami gizi buruk. Harapan hidup berkurang. Biaya sekolah mahal. Kecerdasan tidak beranjak naik.

Berdasarkan catatan *Warta Ekonomi*, kenaikan tersebut dari bulan Januari hingga Agustus 2005 secara berturut-turut adalah Januari US\$ 40,24 per barel; Februari US\$41,68 per barel; Maret US\$ 49,07 per barel; April US\$ 49,63; Mei US\$ 46,96 per barel; Juni US\$ 52,04 per barel; Juli US\$ 58.00 per barel; dan Agustus US\$ 64,67 (Muhardi, 2005).

Jarak pagar dapat ditanam di atas lahan dengan curah hujan rendah, bahkan di lahan yang kurang subur sekalipun. Dengan teknik budidaya yang

baik, setiap hektar lahan dapat menghasilkan 5-10 ton buah jarak per tahun. Pohon jarak mulai berbuah pada umur enam bulan dan mencapai puncak produksinya 5-25 tahun.

### **3.3 Peran Pemerintah dan perguruan tinggi dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat sesuai Amanat Pasal 33 UUD 1945**

Bila Pasal 33 UUD 1945 hendak dijalankan secara konsekuen, menurut hemat penulis, peran pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia adalah melakukan proteksi terutama terhadap pengusaha-pengusaha kecil. Proteksi ini sebenarnya sebelum berfungsi untuk meningkatkan, juga menjaga agar Indeks Pembangunan Manusia ini bertahan.

Proteksi ini dilakukan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang merupakan implikasi dari demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, seperti ditulis Abbas dan Konasi (2005), demokrasi ekonomi menghindari terjadinya sistem ekonomi liberalisme, etatisme, dan pemusatan ekonomi pada suatu kelompok atau monopoli.

Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Perencanaan Nasional Tahun 2000-2004 menyebut lima ciri sistem ekonomi kerakyatan, yaitu: 1. Penegakan prinsip keadilan demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap yang lemah; 2. Pemihakan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya; 3. Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar; 4. Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya, seperti hutan, laut, air, udara, dan mineral secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat masyarakat adat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup (Abbas dan Konadi, 2005).

Namun, sejalan dengan perkembangan politik dunia yang mengarah ke sistem yang liberalistik, sistem ekonomi pun bergeser ke arah kapitalistik. Di sini terjadi penghisapan terhadap kelompok lemah dan pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada sekelompok orang.

Gejala semacam ini semakin kuat belakangan ini. Kasus impor beras merupakan salah satunya. Berkaitan dengan proteksi ini, Imam B. Prasajo

pernah melontarkan kritik atas maraknya mini market sampai ke pelosok-pelosok kecamatan. Dengan berdirinya mini market mini market tersebut, menurutnya, di Jakarta saja tak kurang dari 70 pasar tradisional yang bangkrut karena masyarakat beralih belanja ke mini market. Logikanya, bila satu buah pasar tradisional memiliki seratus kios saja, yang dimiliki oleh seratus kepala keluarga, maka dengan bangkrutnya pasar tradisional tersebut, tujuh ribu keluarga terancam jatuh pada kemiskinan. Di sinilah pemerintah perlu melakukan proteksi. Di Perancis, Jerman, Inggris pun proteksi ada (Prasojo, 2006).

Selama ini belum diperoleh data yang memadai tentang pengaruh kehadiran mini market-mini market sampai ke gang—gang kecil terhadap kelangsungan usaha kecil semacam warung-warung di sekitarnya.. Perguruan tinggi dapat mengambil peran di sini sebagai masukan bagi pemerintah.

## **4 Kesimpulan, Saran, penutup**

### **4.1 Kesimpulan**

1. Peran yang dapat dimainkan pemerintah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat melalui rekayasa sosial adalah dengan menyelenggarakan kurikulum berbasis kreativitas.
2. Peran yang dapat dimainkan pemerintah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat melalui rekayasa teknologi adalah melepaskan ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak. Bahan bakar Minyak yang berasal Sumber Daya Alam yang tak dapat diperbaharui perlu dicari penggantinya semaksimal mungkin dengan bahan dari Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui. Ini dapat dilakukan dengan menggalakkan pembudidayaan tanaman jarak. Penanaman ini pun berfungsi sebagai penghijauan dan jaminan ketersediaan air bersih.
3. Peran yang dapat dimainkan pemerintah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 adalah dengan melakukan proteksi terhadap pengusaha kecil. Lebih baik memproteksi usaha rakyat kecil daripada memberi memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau BOS (Biaya Operasional Sekolah)

## 4.2 Saran

1. Pemerintah disarankan bekerja sama dengan perguruan tinggi mengoptimalkan penelitian mengenai buah jarak. Bila selama ini minyak yang terbuat dari buah jarak dapat memberi kontribusi 10 persen, dengan penelitian yang optimal diharapkan lebih tinggi lagi.
2. Pemerintah dan perguruan tinggi disarankan bekerja sama menanamkan kreativitas kepada anak-anak dengan menggalakan ceritera-ceritera yang mendorong kreativitas. Bila perlu, penanaman ini dilakukan seperti MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an), dilakukan secara permanen setiap empat tahun dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat nasional. Pemenangnya perlu diberi penghargaan yang tinggi. Setiap orang dipacu untuk menciptakan dan mengapresiasi karya sastra yang positif.
3. Pemerintah dan perguruan tinggi disarankan bekerja sama mendesain buku-buku pelajaran anak-anak dengan pendekatan komik. Penelitian di Jepang menunjukkan bahwa pelajaran yang disampaikan melalui pendekatan komik lebih mudah dicerna sebab visualisasi mempermudah *memorize* (HU "Kompas, 8 Agustus 2006).
4. Pemerintah disarankan mendesain kurikulum berbasis kreativitas dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Nantinya, perlu diupayakan proses perkuliahan berbasis kreativitas. Fenomena kreativitas diteliti, figur-figur kreatif dimunculkan dan diseleksi perjalanan hidupnya. Kemudian figur-figur tersebut dijadikan model untuk diterapkan sesuai dengan kondisi sosial- psikologis mahasiswa yang bersangkutan.
5. Karena kreativitas bermula dari interaksi orangtua-anak dalam keluarga, maka para orangtua disarankan mencari wawasan serta mengetahui strategi berinteraksi agar putera-puterinya menjadi generasi kreatif.
6. Bila perlu, pemerintah daerah, kantor wilayah departemen pendidikan nasional dan departemen agama membuat keputusan bersama untuk menyelenggarakan pelatihan orangtua kreatif di kantor-kantor, balai desa, atau majelis taklim, baik dengan biaya pemerintah ataupun swadaya masyarakat.
7. Dinas pendidikan perlu bekerja sama dengan dinas kebudayaan untuk mengoleksi lalu menyeleksi ceritera-ceritera, baik lokal maupun luar, yang dianggap mendorong kreativitas. Mahbub Djunaedi (1989) pernah menayangkan langkah Pemda Jawa Barat yang membiayai pembuatan

- film Si Kabayan. Sebab dalam film tersebut tak terbersit spirit kerja keras atau kerja cerdas. Sementara itu, ceritera Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis, disinyalir sangat kuat mendorong etos kerja dan kreativitas.
8. Pemerintah disarankan mengeluarkan sertifikat bagi guru dan dosen kreatif. Ini penting karena kreativitas siswa atau mahasiswa tak mungkin tumbuh ditangan guru atau dosen yang tak kreatif.
- 

## DAFTAR PUSTAKA

- Althoff, Philip & Michael Rush. 1993. *Pengantar Sosiologi Politik* (Terjemahan)
- Audientia*: Jurnal Komunikasi, Vol. I, No. 2 April – Juni
- Djunaedi, Mahbub. 1989. *Asal-Usul: Kumpulan Kolom HU "Kompas"*. Jakarta : PT. Gramedia.
- <http://www.dikti.org.id>
- Majalah *Tempo*. Edisi 16 Juli 2006. Jakarta : Tempo Inti Media, Tbk.,.
- Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. XXI No. 01 Januari-Maret 2005, LPPM Unisba, Bandung.
- Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. XXI No. 03 Juli - September 2005, LPPM Unisba, Bandung, 2005
- Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. XXI No. 04 Oktober-Desember 2005, LPPM Unisba, Bandung, 2005
- Mudhofir, Ali. 2001. *Kamus Filsuf Barat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Desember 2005. LPPM Unisba. Bandung. 2005
- Rakhmat, Jalaluddin. *Rekayasa Sosial: Reformasi, Revolusi atau Manusia Besar*. Bandung : PT. Remadja Rosda Karya. 2001
- , 1992. *Islam Alternatif*. Bandung : Mizan.
- Semiawan, Conny, dkk. 1999. *Dimensi Kreatif dalam Filsafat Ilmu* Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.